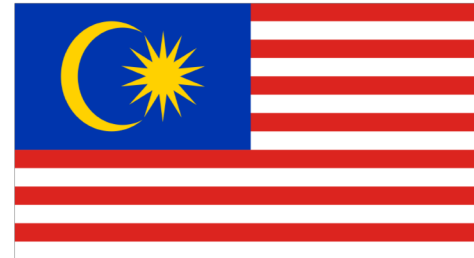


# Pedoman Penyerapan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



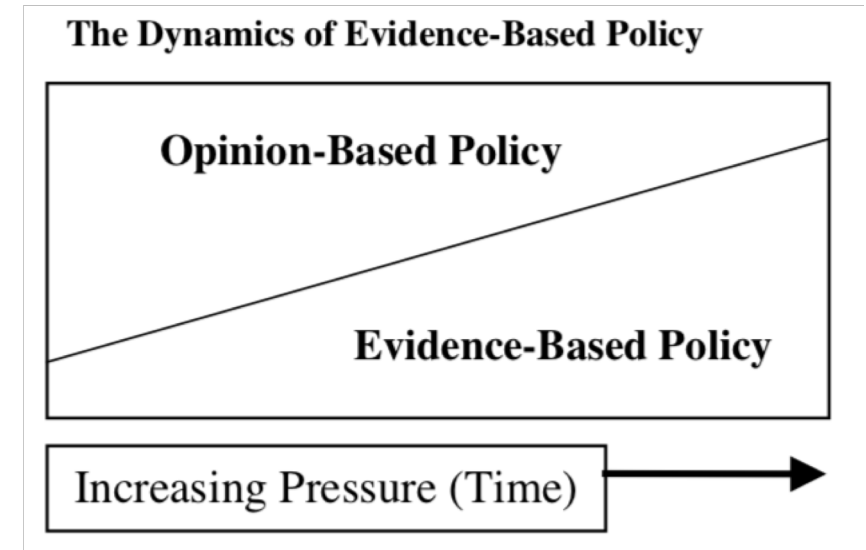
Malaysia  
Funds-in-Trust

This Document is produced under the framework of  
“Valorizing Evidence on Inclusive Social Development  
to Achieve the Sustainable Development Goals”  
Project, funded by the Malaysia Funds in Trust under  
the Malaysia – UNESCO Cooperation Programme  
(MUCP)

# Pentingnya Perumusan Kebijakan Berbasis Riset

# Kebijakan Berdasarkan Riset

- Perumusan kebijakan berdasarkan riset merupakan praktik yang krusial untuk mewujudkan kebijakan inklusif.
- Namun bukan berarti hal ini semata-mata berarti bahwa kebijakan menjadi tidak memihak (subjektif); sebab hasil penelitian tidak luput dari opini dan agenda pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.



# Stakeholder Pendidikan

- Pemerintah
  - Menghasilkan data dan informasi yang relevan dalam perumusan kebijakan.
- Donor Bi- dan Multilateral
  - Menyediakan informasi yang biasanya diminta oleh pemerintah.
- Civil Society Organization (CSO)
  - Lembaga penelitian seperti CIPS; fokus untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian.

# Pentingnya Perumusan Kebijakan Berdasarkan Riset

- Pendidikan merupakan pijakan individu untuk bersaing di dunia modern.
- Pendidikan merupakan sektor yang kompleks dan banyak faktor yang saling memengaruhi.
- Untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif, 6 dimensi kebijakan inklusif UNESCO harus terpenuhi (multi-dimensional, relasional, kontekstual, dsb).

# Rekomendasi

Permendikbud No. 142/2014 harus menerapkan mekanisme yang memungkinkan informasi yang dimiliki *stakeholder* untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

- Mengadakan forum diskusi antara ahli dan *stakeholder* membahas kebijakan utama pendidikan.
- Forum diskusi yang sifatnya *bottom-up*; seperti Musrenbang.

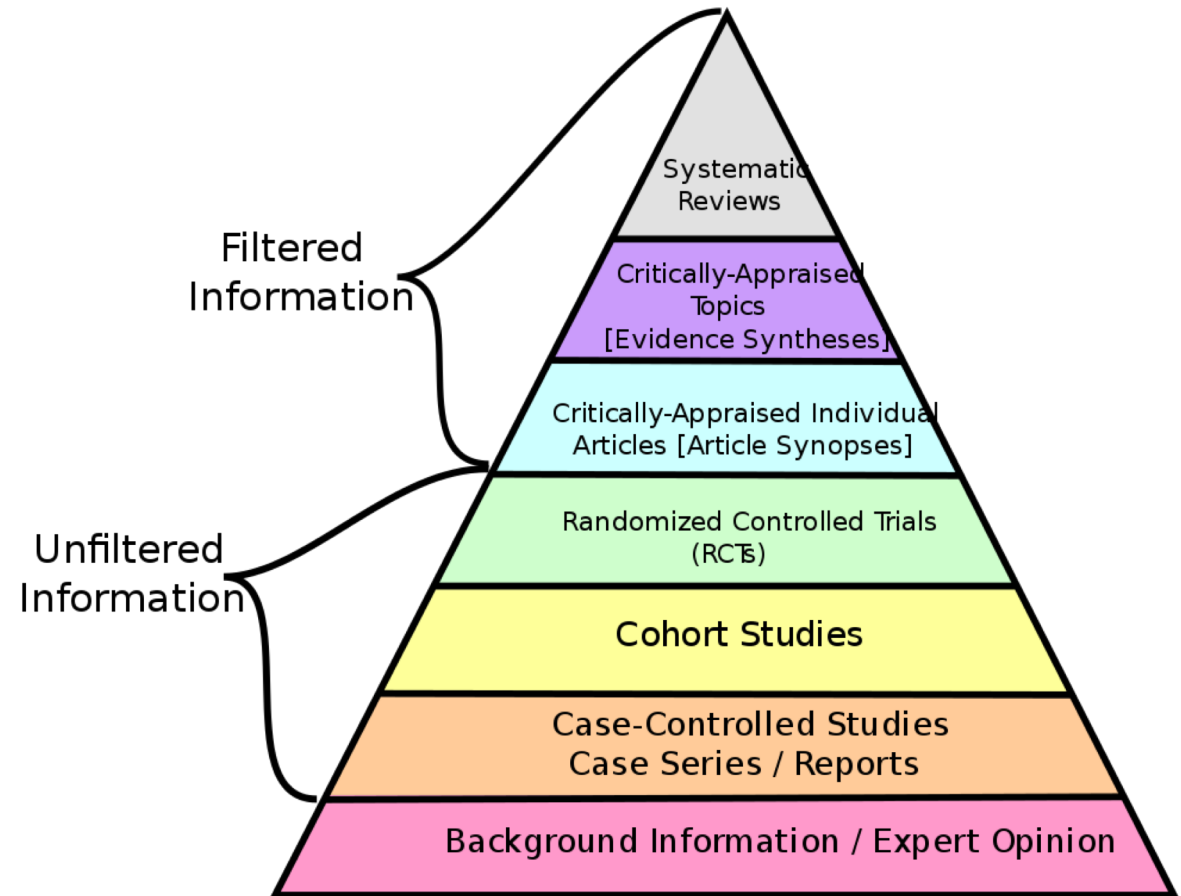
Pemerintah pusat menghimbau Pemda untuk menerapkan sistem koordinasi horizontal.

- Mengadakan forum antar divisi pemerintahan untuk berkoordinasi mengenai strategi penerapan kebijakan.
- Forum serupa sudah diadakan di Sumba dengan nama FPPS.

Informasi Yang Harus Dimasukkan  
ke dalam Perumusan Kebijakan  
Inklusif

# Pemilihan Informasi yang Berkualitas dan Relevan

- Perumusan kebijakan diawali dengan “Naskah Akademik”, dimana sejatinya, informasi diperoleh melalui metode saintifik. Namun “Naskah Akademik” ini juga memuat anekdot personal serta *feedback* penggunaan layanan yang sifatnya tidak saintifik, namun memberikan *insight* yang penting.
- Untuk menampik hal ini, pengambil keputusan dapat mengikuti kerangka acuan metode penelitian ilmu medis, yang mana merupakan salah satu disiplin ilmu yang mewajibkan metode penelitian yang sangat ketat (lihat gambar).





# Rekomendasi

## Pemilihan informasi relevan

- Direkomendasikan bagi komisi ahli pendidikan yang memiliki kemampuan analisis untuk menyortir informasi
- Informasi yang disortir hendaklah relevan dengan kebutuhan pembahasan kebijakan yang sedang dipertimbangkan

## Uji publik yang optimal

- Uji publik yang sudah dilakukan hendaknya digunakan secara jangka Panjang, dikaji dengan baik serta terbuka untuk penyesuaian pada tahap pelaksanaan kebijakan nasional

# Sumber Informasi untuk Kebijakan Inklusif

# Informasi di Pemerintah

- Kemendikbud mengelola informasi terkait Pendidikan dasar dan menengah formal serta non-formal. Informasi dapat juga diakses melalui database online Dapodik.
- Direktorat Pendidikan Islam Kemenag mengelola informasi terkait Pendidikan Islam (Madrasah dan Pesantren). Informasi dapat juga diakses melalui database online EMIS.
- Kemenristekdikti mengelola informasi terkait Pendidikan tinggi formal. Informasi dapat juga diakses melalui database online PD-Dikti.
- Sebagai tambahan, BPS juga merilis data tahunan Pendidikan yang didapat melalui Susenas.

# Rekomendasi

## Pelatihan bagi institusi Pendidikan

- Database kementerian (Dapodik dan EMIS) perlu di perbaharui oleh setiap institusi pendidikan.
- Perlu dilakukan pelatihan cara mengisi dan melengkapi database kepada institusi pendidikan.

## Database yang terintegrasi

- Database yang tersebar memiliki risiko kesalahan serta kontradiktif satu sama lain.
- Kementerian terkait dapat mempertimbangkan untuk membuat sistem pengelolaan data satu pintu, seperti *data pooling*.

## Publikasi informasi

- Beberapa provinsi di Indonesia mempublikasikan laporan tahunan di *website* masing-masing.
- Kemendikbud dapat menghimbau Dinas Pendidikan Daerah untuk memproduksi laporan pendidikan tahunan

Menggunakan Informasi Untuk  
Kebijakan Inklusif

- Informasi yang dikumpulkan oleh donor bi- dan multilateral, CSO tersedia di *website* organisasi masing-masing. Namun, data mentah ataupun informasi lain yang tidak di publikasi dapat diberikan dengan mengajukan permohonan.
- Informasi yang diproduksi donor bi- dan multilateral dapat tersampaikan ke pemerintah dengan lebih mudah ketimbang informasi dari CSO.
- Sementara, CSO menghadapi tantangan untuk dapat menyampaikan informasi kepada pihak pemerintah.

# Rekomendasi

## Penyimpanan data

- Setelah proyek/program berakhir, informasi yang diperoleh memiliki risiko hilang.
- Informasi berharga yang diperoleh dari proyek/program hendaklah disimpan dan dikelola dengan baik sehingga tidak hilang.

## Koordinasi antar CSO

- CSO harus meningkatkan koordinasi satu sama lain guna mengusahakan reformasi kebijakan pendidikan yang inklusif.
- Dapat melakukan pertukaran informasi melalui sistem *data pooling*
- Seperti inisiatif yang dilakukan APC melalui “education intervention interactive map”
- Link: <https://www.asiaphilanthropycircle.org/edu-giving-guide-indonesia/interactive-map-indonesia-education-interventions/>

## Pelatihan Komunikasi dan pengelolaan strategis

- CSO harus mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat memberikan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan inklusif
- Pelatihan strategi komunikasi dan pengelolaan dapat membantu CSO untuk menyajikan informasi dengan format yang sesuai dengan kebutuhan perumusan kebijakan.